



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FORUM DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) SE-INDONESIA**

DAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

TENTANG

**KEGIATAN PENDIDIKAN, RISET, INOVASI,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
BIDANG PERADILAN AGAMA**

Nomor:

Nomor: 2471/DJA/HM2.1/IX/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (18-09-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. : Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Sudirman, MA. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. Drs. H. Muchlis, : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
S.H., M.H. Agung Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat kantor di
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (Lt. 6-8), Jl.
Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Para Dekan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri, PIHAK KETIGA;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah forum yang menghimpun dekan-dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia;

- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) sebagai salah satu unit eselon I di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditjen Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis.
- 3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri Seluruh Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Pendidikan, Riset, Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Bidang Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja sama dalam rangka pendidikan, riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya bidang hukum sesuai kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendidikan, riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya bidang hukum.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang meliputi:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik, Hakim dan pegawai PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK bersepakat melaksanakan penelitian, riset dan inovasi;
 - c. PARA PIHAK bersepakat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat termasuk pemagangan dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik;
 - d. PARA PIHAK melakukan koordinasi dan kerja sama untuk menggali potensi yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme bidang hukum;

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA			PIHAK KETIGA		
				7				

- e. PARA PIHAK melakukan kerja sama untuk menciptakan dan mengembangkan riset dan inovasi serta pembaharuan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di bidang hukum; dan
- f. bidang lainya yang disepakati bersama secara tertulis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK dapat melakukan satu atau lebih kegiatan pada setiap bidang ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara spesifik dalam *Implementing Agreement* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak:
 - a. menjadi mitra dalam menyelenggarakan pendidikan, riset, inovasi, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya hukum;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan, riset, inovasi, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya bidang hukum disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK wajib:
 - a. memberikan pendampingan dalam kegiatan pendidikan, riset, inovasi, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya bidang hukum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. membuat rencana kegiatan bersama;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan;
 - d. membuat rencana kegiatan bersama; dan
 - e. membuat laporan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam *Implementing Agreement* dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA			PIHAK KETIGA		
				4				

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau dalam pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki untuk diadakan *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan serta juga bentuk komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika :
- a. dikirimkan dengan kurir dan/atau media internet, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
 - b. dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
 - c. ataupun disampaikan secara langsung dan ada tanda terima jika dikirimkan ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten 15412

Telpon : (021) - 7401925

Email : fsh@apps.uinjkt.ac.id

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA			PIHAK KETIGA		
				7				

PIHAK KEDUA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Alamat : Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8), Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.
58 ByPass Jakarta Pusat
Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Telepon : 021) 29079177

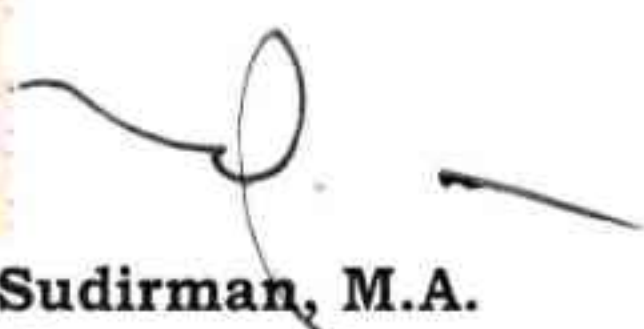
PIHAK KETIGA

Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Seluruh Indonesia, yang dalam hal surat-menyurat menggunakan alamat
sebagaimana tertera pada PIHAK KETIGA.

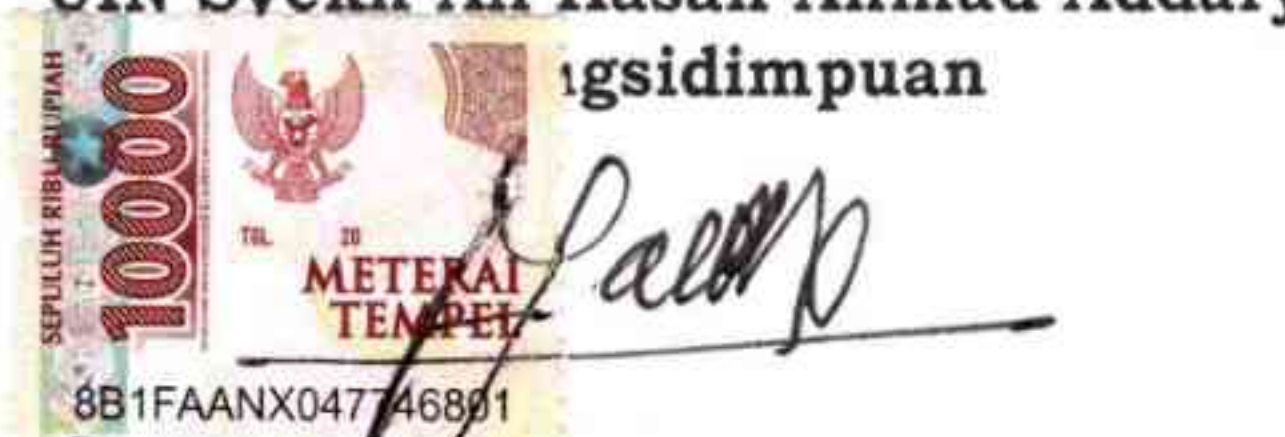
Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

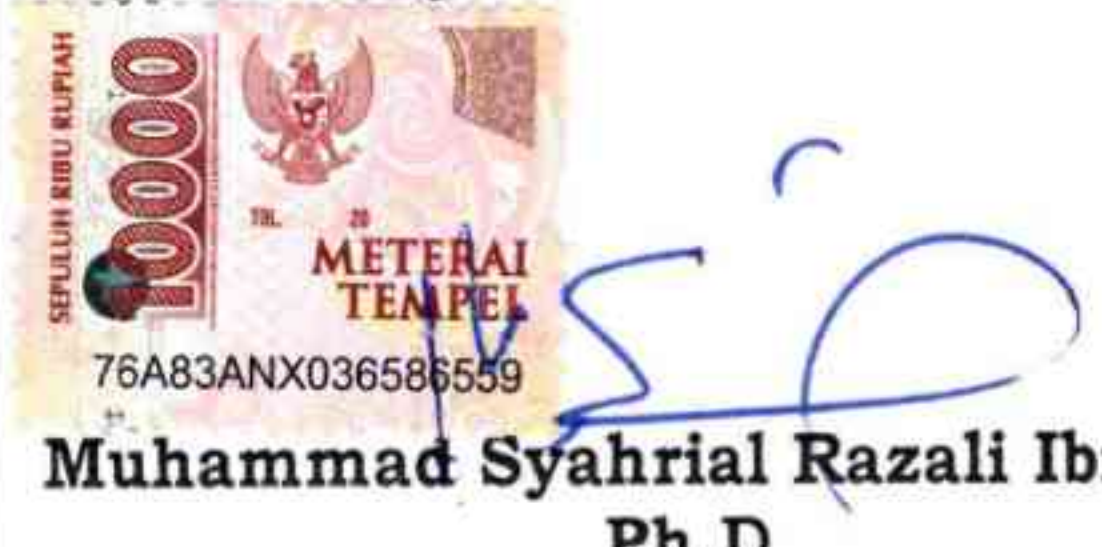
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,  Prof. Dr. Sudirman, M.A. Ketua	Pihak Kedua Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI,  Drs. H. Muchis, S.H., M.H. Direktur Jenderal
---	---

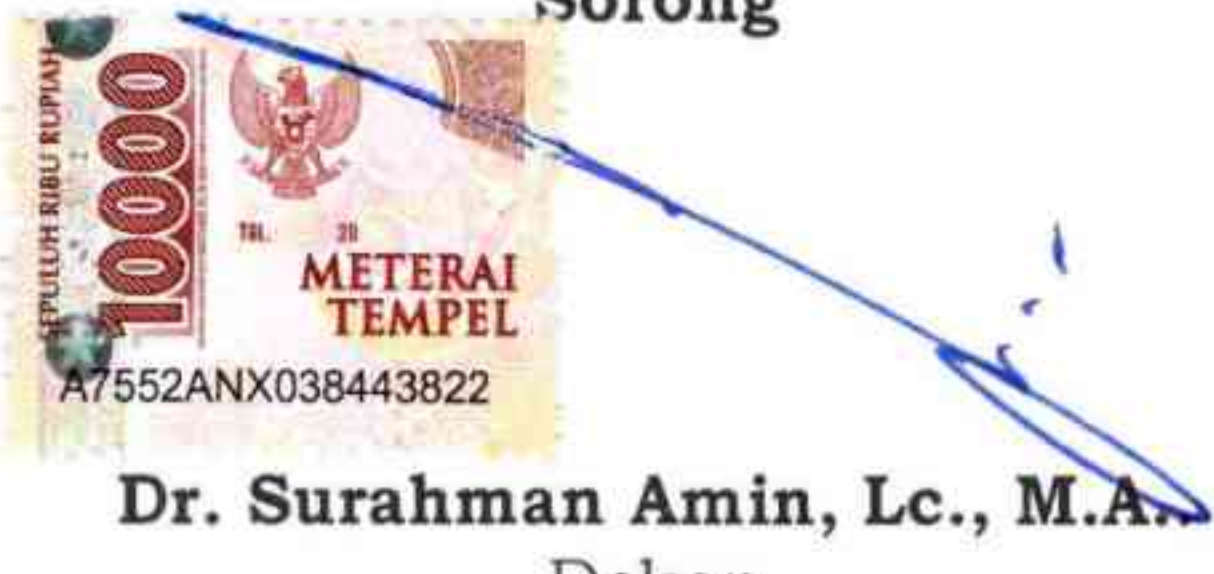
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati,  19D72ANX047746804 Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanudin,  E9DF3ANX047746809 Dr. Iin Ratna Sumirai, S.H., M.Hum Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu  985A1ANX047746807 Prof. Dr. Suwarjin, MA Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh  1270FANX047746803 Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah Raden Mas Said Surakarta  661B0ANX047746806 Prof. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  2F428ANX047746802 Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Svekha Ali Hasan Ahmad Addary Sidsidimpuan  8B1FAANX047746801 Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Savvid Ali Rahmatullah Tulungagung  5ECA7ANX047746808 Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu  8CB0CANX036586551 Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  0EB65ANX036586561 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

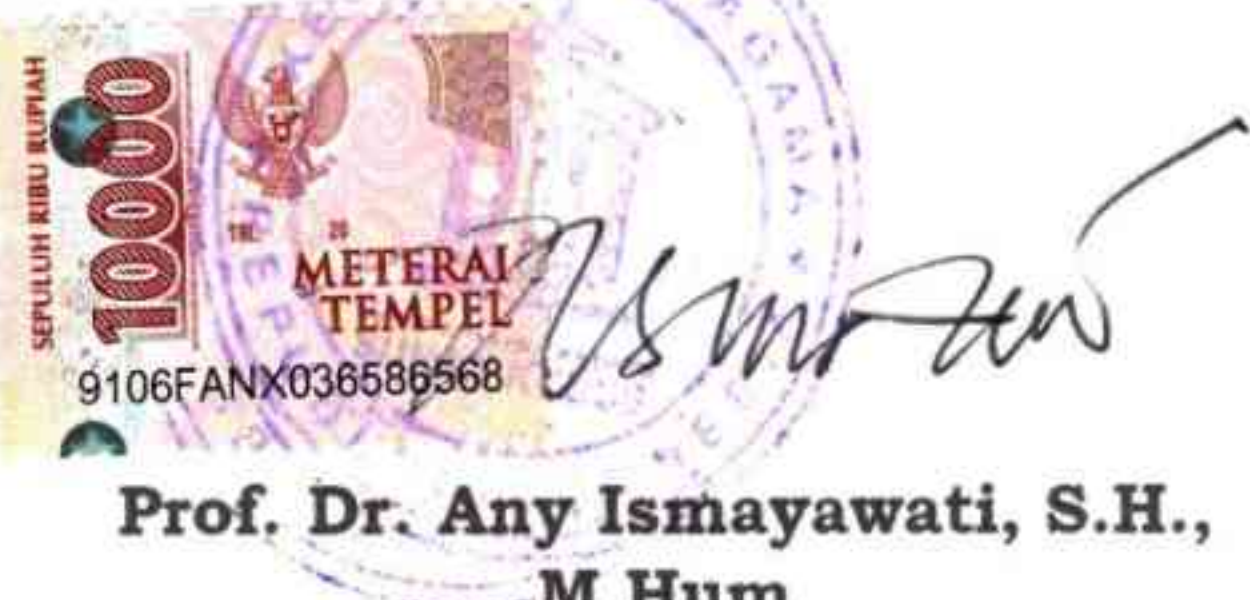
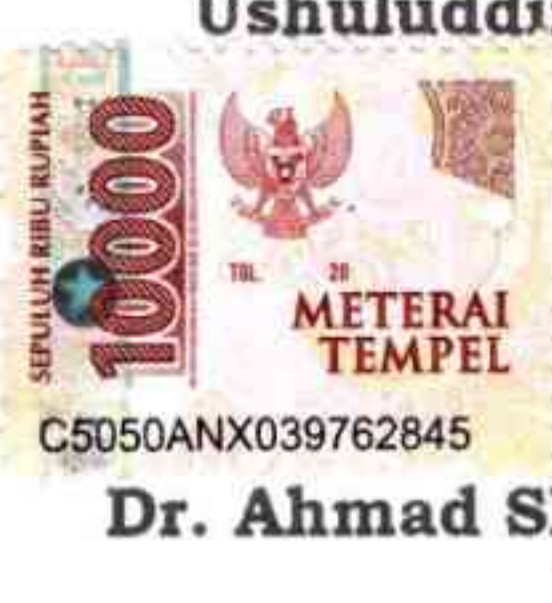
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan  Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah Imam Bonjol Padang  Dr. Alfadli, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  Dr. Supani, M.A. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Salatiga  Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Mataram  Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nuriati Cirebon  Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi  Prof. Dr. Ahmad Syukri Saleh, M.A. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Lhokseumawe  Muhammad Syahril Razali Ibrahim, Ph.D Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Sultan Aji ad Idris Samudra  Prof. Alfitri, M.Ag, Ph.D Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri  Dr. Khamim, M. Ag. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Ambon  Eka Dahlan Uar, M.Si Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong  Dr. Surahman Amin, Lc., M.A. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Palangkaraya  Dr. Syarifuddin, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare  Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syakh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  Dr. H. Iskandar, M.Hum Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah IAIN Kendari  Prof. Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah IAIN Pontianak  Dr. Firdaus Achmad, M. Hum Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo  Prof. Dr. Ahmad Faisal, M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado  Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Dekan

Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Palopo  Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Madura  Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau  Dr. H. Maghfirah, M.A Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  Dr. Ngadri Yusro, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone  Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Fakultas Syariah IAIN Ternate Maluku Utara  Prof Dr H Jubair Situmorang, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua  Dr. Drs. Sabar Podu, M.HI Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember  Dr. Wildani Hefni, M.A. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah IAIN Kerinci  Dr. Arzam, M.Ag Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  Dr. Yaser Amri, MA Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Ponorogo  Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan
Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus  Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum Dekan	Pihak Ketiga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  Prof. Dr. Ismail, M.Ag Dekan
Pihak Ketiga Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  Dr. Anton Jamal, MA Ketua	Pihak Ketiga Jurusan Syariah STAIN Majene  Nuzha S. Sy., M.H.I. Ketua
Pihak Ketiga Jurusan Syariah STAIN Mandailing Natal  Ketua	Pihak Ketiga Jurusan Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Bintan Kepulauan Riau  Ketua
Pihak Ketiga Fakultas Syariah, Dakwah, dan Ushuluddin IAIN Takengon  Dr. Ahmad Sholihin Siregar, MA Dekan	Pihak Ketiga Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkalis  Muhammad Al Mansur, S.Sy, M.I.S Ketua

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA